

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Sofmedia: Medan.
- Adnan T opan Husodo. *Pengaturan Dana Kampanye Dan Implikasinya Terhadap Praktik Korupsi Pemilu*. Yayasan Perludem, Jakarta 2012
- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- . 2014. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta:Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. PT CitraAditya Bakti: Bandung.
- . 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra AdityaBakti: Bandung.
- Abdul R. Saliman. 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan ContohKasus)*, Kencana, Jakarta.
- Adrian Sutedi. *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum AcaraPidana*, Bandung: Angkasa, 1990
- Ari Yusuf Amir. 2020. *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*. Arruzz Media: Jogjakarta.
- A Ridwan Halim. 1985. *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab Cetakan Kedua*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- A.S.S Tambunan. 1986. *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan KedudukanMPR, DPR, dan DPRD*. Binacipta: Bandung.
- A. Zainal Abidin. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita: Jakarta.

- Bambang Yuniarto. 2008. *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*. Deepublish: Yogyakarta.
- Barda Nawawie Arief. 1988. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bahan PenyediaBahan Kuliah FH Undip: Semarang.
- , 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Pers: Jakarta.
- , 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. PTRaja Grafindo: Jakarta.
- Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Raja Grafindo Perss: Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Kencana: Jakarta.
- Chaidir Ali. 1976. *Badan Hukum*. Alumni: Bandung.
- Christoper Ryan. 1998. *Criminal Law*, 5th, Edition, Blackstone Press Limited:London.
- Dedi Mulyadi. 2012. *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*. Gramata Publishing: Jakarta.
- Didik Suprianto, Lia Wulandari, *Basa-basi dana kampanye pengabaian prinsip transparansi akuntabilitas peserta pemilu*, Yayasan Perludem, Jakarta selatan, 2013
- Djoko Prakoso. 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Harapan:Jakarta
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Kencana Prenada Media Group: Depok.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya*. Stora Grafika: Jakarta.
- E Saefullah Wiradipradja. 1999. *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*. Liberty: Yogyakarta.
- F. Sorensen. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*.

Pustaka Pelajar:Yogyakarta.

- Flatchers,Marcus,1990,A level Principle of English law, 1st edition,HltPublikation, London
- Hanafi. 1999. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. dalam JurnalHukum. FH UII: Yogyakarta.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Hazbullah F Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Grup: Jakarta.
- Henry N Pontell and Gilbert Geis. 2007. *Internasional Handbook of White Collar and Corporate Crime*. Spinger: Boston.
- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo: Persada
- IG Rai Widjaya. 2007. *Hukum Perusahaan. Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha*. Megapoin: Jakarta.
- Ingrid van Biezen, *Financing Political Parties and Elections Campaigns*, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003
- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*. Nuansa Aulia: Bandung.
- John Minkes and Leonard Minkes. 2008. *Corporate and White Collar Crime*. Sage Publikation Ltd: London.
- Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jala Permata Aksara: Jakarta.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2011. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi Di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT Refika Aditama: Bandung.
- , 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam*

Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016. Sinar Grafika: Jakarta. Lawrence M Friedman. *An Introduction Law And Society*. Sage Publikations.

-----, *The Republik of the Choice Law. Authority and Culture*.

-----, 1990. *On Legal Development*. Rutgers; Law Review.. Cambrige. Massachusetts. . Harvard University Press. London: England.

Lawrence M Salinger. 2005. *Encyclopedia of White Collar and Corporate Crime*. Sage Publikation: Inc. California.

Leden Marpaung. 1991. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta

L Sholehuddin. 2005. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar DoubleTrack System dan Implementasinya*. Raja Grafindo: Jakarta.

Mahrus Ali. 2008. *Kejahatan Korporasi. Kajian relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Arti Bumi Intaran: Yogyakarta.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Kumpulan Karangan Buku Kesatu. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI: Jakarta.

Marsono. 1996. *Pemilihan Umum 1997: Pedoman. Peraturan dan Pelaksanaan*. Djambatan: Jakarta.

Mas Achmad Daniri. 2006. *Good Corporate Governance*. Ray Indonesia: Jakarta.

Michael Bohlander. 2002. *Principles of German Criminal Law*. Hart Publishing: Oxford and Portland.

Michael J Allen. 1977. *Textbook on Criminal Law*. Blackstone Press Limited: Great Britain.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.

Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup*

Berlakunya Ilmu Hukum. Buku I. Alumni: Bandung.

Modul Pemantauan Dana Kampanye ICW dan TII 2003.

Morrison. 2005. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Ramdina Perkasa: Jakarta.

M Rusli Karim. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Tiara Wacana Yogya:Yogyakarta

Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. STHB. Bandung.

-----, 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group: Jakarta.

-----, 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

-----, 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edisi Ketiga. Prenada Media Group: Jakarta.

Muladi dan Diah Sulistyani RS.. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Alumni. Bandung.

Natasha Aljalalain. 1999. "The Fourteenth Amendment and Personhood: Factor Fiction." St Jhon's Law Review 73.2.

Nanang Sambas. dan Ade Mahmud. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*. Refika Aditama: Bandun

Oemar Seno Adji. 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Erlangga. Jakarta.
Ohman, M (2014). Getting the Political Finance System Right. Dalam Falguera et.al . Funding of Political Parties and Election Campaigns :A Handbook on Political Finance.

Stockholm : IDEA Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). *Behind the Corporate Veil. Using Corporate Entities for Illicit Purpose*. 2001. OECD Publikations: Paris.

P.A.F Lamintang. 1994. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.:Jakarta.

- Peter Gillies. 1990. *Criminal Law*. The Book Company limited: Sidney. Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta.
- , 2008. *Penelitian Hukum, Kencana*: Jakarta. 2008.
- , 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet ke 6. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Rinduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R. Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I. Dian Rakyat: Jakarta.
- R. Soeroso. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Raisul Mutaqien. 2006. *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*. Bandung. Roger Geary. 2002. *Understanding Criminal Law*. Cavendish Publishing Limited: Oregon USA.
- Romli Atmasasmita. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Yayasan LBH: Jakarta.
- , 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju: Bandung.
- , 2016. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*. Prenada Media. Jakarta.
- Robert W. Emerson. 2004. *Bussines Law*. 4th. ed. Barrons. New York. Rony Hanitidjo Soemitro. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*. Jakarta 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Kencana.
- Said Sampara dan La Ode Husen. 2017. *Metode Penelitian Hukum*.

Kretakupa Print: Makassar.

Sally S Simpson. 2002. *Corporate Crime. Law and Social Control*. The Cambridge University Press: Cambridge.

Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung

Setiyono. 2009. *Kejahatan Korporasi*. Bayu Media Publishing: Malang.
Setiyono, H., 2005, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Edisi kedua Cetakan Ketiga, Malang: Banyumedia Publishing

Soedarsono. 2006. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum 2004: Sekretaris Jenderal dan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta.

Somardi. 2007. *General Theory Of law and State . Teori Umum Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. BEE Media Indonesia: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press: Jakarta.

Soetan K Malikoel Adil. 1955. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Pembangunan: Jakarta.

Somardi. 2007. *General Theory Of law and State . Teori Umum Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. BEE Media Indonesia. Jakarta.

Suharto R.M.. 1996. *Hukum Pidana Materiel: Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Press: Jakarta.

-----, 2017. *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya Edisi Kedua*, Kencana: Depok.

- Syahrudin Nawi. 2017. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. UMITOHA: Makassar.
- Ted Nace. 2005. *Gangs of America: The Rise of Corporate Power and The Disabling of Democracy*. Berrett-Koehler Publisher Inc: San Francisco.
- Tim Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. 2017. *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*. Mahkamah Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media Group: Jakarta
- Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Thom Hartmann. 2010. *Unequal Protection: How Corporation Became "People"- and How You Can Fight Back*. Berrett-Koehler Publisher Inc: San Francisco.
- Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Grafika: Jakarta
- Veri Juaidi. *Pengaturan Dana Kampanye Pemilu: Mau Dibawa Kemana?*. Yayasan Perludem, Jakarta 2012
- Wirjono Prodjodikoro. 1966. *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Sebelum Amandemen).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Setelah Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Komisi Pemilu Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Jurnal Ilmiah

Alvi Syahrin, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar (Medan: USU, 2003

Anindita, Pritta dan Yulianti, Retno. 2017. "Pengungkapan CSR, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan". Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember, 2017. Universitas Prasetiya Mulya.

Arbani, Tri Suhendra. "Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Al-Haḍārāh Al-Islāmiyah* 2.1 (2022): 23-37.

Asriati, Asriati, and Sumiyati Baddu. "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen." *Pleno Jure* 10.1 (2021): 521942.

Bambang Sugianto. *Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Al'adl. Volume Ix Nomor 3. Desember 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.

Bawole, Grace Yurico. "Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability." *Lex Et Societatis* 6.8 (2019).

Ben Reilly, *Sistem Pemilu*, Dari ACE Project, kerjasama IFES-IDEA- UN

- Coles, R., & Susen, S. (2018). The Pragmatic Vision of Visionary
- Candra, Septa. "Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang." *Jurnal Cita Hukum* 1.1 (2013): 95895.
- Daniri, Mas Achmad. "Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan." *Indonesia: Kadin Indonesia* 2.1 (2008): 1-36.
- Dita, Sekar Ayu, and Atik Winanti. "Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank." *Jurnal USM Law Review* 6.2 (2023): 526-542.
- Gunanegara. *Mafia Tanah & Primum Remedium*. Jakarta: Freefik.com, 2018.
- Junaidi, Veri, Firmansyah Arifin, and Fadli Ramadhanil. "Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014." *Jakarta: Yayasan Perludem* (2015).
- Kiki Lutfillah. Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat). *Jurnal Kybernan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2011. 18-29.
- Lia Wulandari, Dana Kampanye Pemilu di Indonesia: Isu Krusial yang Cenderung Terabaikan, Dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi Yayasan Perludem, No. 3, Jakarta, November 2012
- Mada Sukmajati, Fikri Disyacitta, 2020, Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (1), 75-95
- Mada Sukmajati, Fikri Disyacitta, 2020, Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (1), 75-95
- Magnus Öhman and Hani Zainulbhai (ed), *Political Finance Regulation: The Global Experience*, Washington DC: International Foundation for Election System, 2007
- Mardjono Reksodiputro, "Kejahatan Korporasi: Suatu Fenomena Dalam Bentuk Baru", *Indonesian Journal of International Law*, Volume 1, 4 Juli 2004, Hal. 605-706.
- Mardjono Reksodiputro. "Kejahatan Korporasi suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru". dalam Jurnal Hukum Internasional.

Volume I Nomor 4 Juli 2004. hal. 694-695.

Merray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No.3 Tahun 2016, Hal. 87.

Mohd. Din Dkk. *Pertanggungjawaban Partai Terhadap Calon Anggota Legislatif yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.16. 2016. Hal. 33.

Naldo, Rony Andre Christian, Mesdiana Purba, and Ifransko Pasaribu. *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Penerbit Enam Media, 2022.

Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan." *Gema Keadilan* 6.3 (2019): 242-267.

Nursyamsi Ichsan, and Ramli. *Hukum Perjanjian & Bisnis*. CV. Azka Pustaka, 2022.

Pinilih, A. 2017. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pngaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum*. (29:1) pp 69-81

Pragmatism: The Challenge of Radical De-mocracy in a Neoliberal World Order. *Contemporary Political Theory*, 17(2), 250–262. DOI:10.1057/s41296-018-0196-

Putra, H. 2018. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanyepada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. (6:2) pp 112-119.

Ramadhini, Nabila Alya, and Serly Marselina. "Dampak Aktivitas Pertambangan Lapindo Sidoarjo Terhadap Hak Asasi Manusia." *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*. Vol. 3. 2023.

Roberts, J. and Scapens, R.W. (1985), "Accounting systems and systems of accounting: understanding accounting practices in their organizational contexts", *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 10 No. 4, pp. 443- 456.

Sariowan, Irene BD. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Dan Perusakan

Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Lex Privatum* 11.1 (2023).

Setiyono, Setiyono. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18.1 (2013).

Sidabutar, Richard Rando. "Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Korporasi Dalam Hal Terjadi Likuidasi." *Journal of Law and Policy Transformation* 1.1 (2016): 159-182.

Simarmata, M. (2018). Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum. *Jurnal Legislasi Indonesia*

Syaprillah, Aditia. "Penegakan hukum administrasi lingkungan melalui instrumen pengawasan." *Bina Hukum Lingkungan* 1.1 (2016): 99-113.

Tamangpra, Qisthi, and S. H. Sudaryono. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Tanudjaja, Tanudjaja. "Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Hukum Indonesia* 3.3 (2024): 96-106.

Topan, Muhammad. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektip Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Nusamedia, 2019.

Wardana, Surya Kusuma, and Lailasari Ekaningsih. "Perbandingan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Berbagai Negara: Pelajaran untuk Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 4.1 (2023): 819-900.

Wegik Prasetyo, *Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang*, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 15-27

Wegik Prasetyo, *Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang*, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 15-27

Wijaya, Ilham Giri, and Gelar Ali Ahmad. "Pertanggungjawaban pidana pengguna layanan iklan elektronik yang bermuatan pada program iklan penyelenggara sistem elektronikpenipuan." *Novum: Jurnal Hukum* (2025): 229-240.

Wiwik Afifah. *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*. Mimbar Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum. 2014.

Wulandari. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi*. Serat Acitya. Jurnal Untag Vo. 1. Semarang. 2013.

Internet

Daud, A. (2019). *Sejumlah LSM Soroti Penurunan Dana Kampanye 2019*. Diakses 5 Maret 2022, dari :
<https://katadata.co.id/berita/2019/01/28/sejumlah-lsm-soroti->

Dwi, A. 2018. Dana Kampanye Bisa Repotkan Parpol. Diakses 8 Februari 2020 pada website Radar Malang pada
<https://radarmalang.id/dana-kampanye-bisa-repotkan-parpol/>

Hariyanto. 2015. Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih. Diakses 17 Februari 2020 dari website
Pekab Kebumen pada
<https://www.kebumenkab.go.id/index.php/publik/article/detail/89>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/18433031/bawaslu-sebut-ada-563-sengketa-pemilu-selama-2018>. Penulis Fitria Chusna Farisa | Editor Inggried Dwi Wedhaswary. di Akses Tanggal 20 Februari 2022.

<https://m.cnnindonesia.com/Bantu> 39.5 M buat Kampanye. Sandi dinilai Langgar UU Pemilu. CNN Indonesia. oleh Feri Agus Setyawan. pada Rabu. 02/01/2019. h di Akses pada 03/03/2022

KPU Kota Batu: Admin KPU Kota Batu. 2018. Ini Lho!! Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019. Diakses 13 Februari 2022 dari website KPU pada <https://kpukotabatu.go.id/inilho-laporan-awal-dana-kampanye-peserta-pemilu-2019/>

www.tribunnews.com , ICW: Pelaporan Dana Kampanye Partai Tidak Jujur, diakses pada tanggal 04 Maret 2022, pada pukul 10.00. WIT

Tribun Jatim: Putri Sany Eka. 2019. Bawaslu Kota Batu Curigai Partai yang Laporkan Dana Kampanye Nol Rupiah. Diakses (21 Februari 2022) dari Harian Tribun Jatim pada

<https://jatim.tribunnews.com/2019/02/13/bawaslu-kota-batu-curigai-partai-yanglaporkan-dana-kampanye-nol-rupiah?page=2>

Zoltan Andras Nagy. *Some Problems Of The Criminal Liability Of Legal EntityIn Criminal Dogmatics*. dalam <https://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/trest/nagy.pdf>. hlm 2.